



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 01 Desember 2016

Halaman: 10

RAPBD 2017 Disetujui

UMBULHARJO, BERNAS

--Persetujuan bersama atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta 2017 akhirnya disepakati oleh pemerintah dan legislatif tepat pada hari terakhir batas waktu penetapan, Rabu (30/11) kemarin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan DPRD pada awalnya merencanakan penetapan persetujuan bersama RAPBD 2017 pada Senin (28/11), namun karena perlu dilakukan sejumlah penyesuaian, maka penetapan persetujuan bersama diundur menjadi Rabu (30/11).

"Total RAPBD 2017 ditetapkan sebesar Rp 1,6 triliun dengan defisit sekitar Rp 201 miliar. Defisit akan ditutup menggunakan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa). Namun, kepastian jumlah Silpa masih menunggu audit dari BPK," kata Kadri Renggono, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta.

Penetapan persetujuan bersama RAPBD Kota Yogyakarta 2017 pada hari terakhir batas waktu penetapan membuat Kota Yogyakarta tidak akan terkena sanksi dari pemerintah pusat.

Meskipun demikian, lanjut Kadri, kebijakan anggaran dari pemerintah pusat yang akan diterapkan tahun depan yaitu

membatasi atau mengurangi transfer dana ke daerah khususnya dana alokasi khusus (DAK) dan dana insidental daerah (DID).

"Sebenarnya alokasi DAK masih cukup banyak sekitar Rp 150 miliar, namun untuk DID berkurang cukup signifikan yaitu dari Rp 40 miliar menjadi sekitar Rp 7,5 miliar," katanya.

Meskipun demikian, Kadri mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta tetap menganggarkan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar untuk masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kewilayahan.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi mengatakan anggaran 2017 belum akan mengakomodasi program-program yang ditawarkan pasangan calon kepala daerah yang saat ini sedang berkontestasi dalam Pilkada 2017.

"Anggaran 2017 disusun beberapa bulan lalu. Sehingga kegiatan atau program yang akan dijalankan tahun depan sifatnya normatif," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, program atau kegiatan yang ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah saat kampanye diperkirakan baru bisa dimasukkan dalam Rancangan APBD 2018. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005